

Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Mega Arafah, Rifki Khoirudin*

Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Dahlan

* rifki.khoirudin@ep.uad.ac.id

Abstract

Inequality of income distribution is a condition of different levels of economic prosperity which is reflected in differences in income levels so that there are rich and poor people. Development is carried out in a sustainable manner with the aim of achieving a prosperous society by utilizing the available resources and potential to the fullest. However, the results of development still lead to income inequality. This study aims to determine the effect of poverty, education, HDI, economic growth, and population on the inequality of income distribution in districts/cities in Bali Province in 2011-2021. The analytical method used is the panel data regression model. The results of this study indicate that the level of poverty affects the inequality of income distribution, while education, HDI, economic growth and population have no effect on the inequality of income distribution.

Keywords: *Poverty Level, Education, Human Development Index, Economic Growth, Population*

Abstrak

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan kondisi perbedaan tingkat kemakmuran ekonomi yang tercermin dari perbedaan tingkat pendapatan sehingga ada masyarakat yang kaya dan miskin. Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mencapai masyarakat sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia secara maksimal. Tetapi, hasil dari pembangunan masih menyebabkan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, pendidikan, IPM, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2021. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan model regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sementara pendidikan, IPM, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan kondisi adanya perbedaan tingkat kemakmuran ekonomi yang tercermin dari adanya perbedaan tingkat pendapatan sehingga ada masyarakat yang kaya dan miskin Baldwin dalam (Sugastuti & Pratama, 2022). Penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi demografi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah yang menyebabkan munculnya istilah daerah maju dan daerah berkembang. Tidak meratanya distribusi pendapatan disebabkan karena jumlah pendapatan yang diterima dan dihasilkan oleh masyarakat.

Di setiap wilayah pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor dari keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Oleh karena itu tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat

mencerminkan seberapa besar usaha dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut (Hindun et al., 2019) bahwa variabel kemiskinan memiliki pengaruh yang positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, karena apabila sumber daya manusianya tidak berkualitas maka dapat menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan yang artinya tidak memperoleh pendapatan sehingga akan membuat ketimpangan pendapatan yang tinggi, berbeda apabila sumber daya manusianya handal dan memiliki potensi yang tinggi maka akan mendapatkan pendapatan yang tinggi pula melalui pekerjaan yang dimilikinya. (Nadya & Syafri, 2019) dalam penelitian terdahulunya mengemukakan bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan skill atau keterampilan antara yang memiliki pendidikan tinggi dengan pendidikan rendah. Menurut (Araja et al., 2020) pada penelitian terdahulunya mengemukakan bahwa IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan karena ketika pembangunan manusianya memiliki kualitas yang baik maka akan membuat ketimpangan pendapatan semakin rendah. Selain itu, dalam penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dimana apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka ketimpangan pendapatan akan turun. Dan dalam penelitian menurut (Syamsir & Rahman, 2018) mengemukakan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, hal ini disebabkan karena apabila semakin tinggi jumlah penduduk maka akan meningkatkan jumlah pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat menurun.

Bali merupakan salah satu Provinsi yang berada di Indonesia yang terkenal hingga ke pelosok dunia sehingga diharapkan dapat mendorong terdistribusinya pendapatan secara adil. Tetapi nyatanya Bali yang terdiri dari 1 wilayah kota, 8 wilayah kabupaten dan 57 kecamatan merupakan wilayah yang mengalami ketidakmerataan pendapatan yang disebabkan karena perbedaan karakteristik masing-masing wilayahnya. Karena adanya pola pembangunan ekonomi dan kemampuan tumbuh masing-masing wilayah berbeda inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Bali dalam proses percepatan pembangunan antar wilayahnya mengalami ketidakmerataan yang diakibatkan oleh adanya pengaruh yang cukup kuat dari perbedaan karakteristik wilayah baik itu dari letak geografisnya maupun dari potensi sumber daya yang ada. Perbedaan karakteristik ini menjadi penyebab terciptanya pola pembangunan ekonomi yang tidak seragam sehingga kemampuan tumbuh masing-masing wilayah berbeda. Pada akhirnya kemampuan tumbuh yang berbeda menciptakan terjadinya ketimpangan baik ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan sendiri terdiri dari ketimpangan dalam proses pembangunan dan ketimpangan pendapatan.

Tabel 1 Indeks Gini Rasio Tahun 2011-2021

Tahun	Provinsi	
	Bali	Indonesia
2011	0,387	0,388
2012	0,397	0,413
2013	0,440	0,406
2014	0,442	0,414
2015	0,399	0,402
2016	0,374	0,394
2017	0,379	0,391
2018	0,364	0,384
2019	0,370	0,380
2020	0,369	0,385

Tahun	Provinsi	
	Bali	Indonesia
2021	0,375	0,381

Sumber : BPS (2022)

Jika dilihat dari data tabel 1 diatas, dari tahun ke tahun tingkat ketimpangan pendapatan di provinsi Bali berfluktuasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan didasarkan pada data yang bersumber dari BPS diukur dengan menggunakan gini ratio pada tahun 2011 sebesar 0,387 hampir mendekati gini ratio nasional yaitu sebesar 0,388. Ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan data rasio gini pada tahun 2013 sebesar 0,440 dan tahun 2014 sebesar 0,442 yang mana angkanya berada di atas ketimpangan nasional yang masing-masing sebesar 0,406 dan 0,414. Pada tahun selanjutnya yaitu 2015 hingga 2020 mengalami fluktuasi angka ratio gini yang mana ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali masuk ke dalam kategori ketimpangan rendah yaitu $<0,40$ (bps.go.id).

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, ketimpangan distribusi pendapatan provinsi Bali mengalami kenaikan pada tahun 2013-2014 dan melebihi angka rasio gini Indonesia lalu pada tahun selanjutnya berfluktuasi. Sehingga penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh dari faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali. Dengan harapan pemerintah dapat mengetahui pengaruh dari faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan yang bertujuan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang semakin memburuk kedepannya dan apakah faktor tersebut mempengaruhi ketimpangan pendapatan di tahun berikutnya. Berdasarkan uraian tersebut maka dengan itu penulis bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pendidikan, IPM, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2011-2021”.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2021.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2021.
5. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2021.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka

Baldwin dalam (Sugiastuti & Pratama, 2022) menjelaskan bahwa kesenjangan pendapatan merupakan kondisi dimana terjadinya perbedaan kemakmuran ekonomi yang meliputi masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan pendapatan masyarakat tersebut. Todaro dalam (Wijayanto, 2016) menjelaskan bahwa adanya ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan beberapa hal yaitu ketika terjadi kondisi ketimpangan yang ekstrim dianggap sebagai hal yang kurang adil dalam perekonomian karena dapat menimbulkan inefisiensi ekonomi, solidaritas melemah dan stabilitas sosial menurun.

Kemiskinan adalah kondisi dimana penduduk mempunyai pengeluaran dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini penduduk dikatakan miskin jika pengeluaran perbulan rata-rata perkapitanya dibawah rata-rata kemiskinan (Margareni et al., 2016), kemiskinan adalah : “ *The denial of choice and oppotunities most basic for human development to lead a long healthy,*

creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other”.

Menurut Schultz dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dapat dilakukan dengan adanya perubahan pada modal manusia yang semakin meningkat. (Hindun et al., 2019) menjelaskan bahwa peningkatan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan yang menyebabkan distribusi pendapatan merata dalam jangka panjang.

IPM merupakan angka yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang telah didapatkan dari hasil pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM mencakup mengenai bagaimana penduduk dapat mengakses hasil dari pembangunan baik untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan lain sebagainya.

(Badan Pusat Statistik, 2020) Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan produksi barang dan jasa terhadap nilai tahun sebelumnya pada suatu wilayah dan pada tahun tertentu yang didasarkan pada PDB/PDRB atas dasar harga konstan.

Penduduk menurut (Badan Pusat Statistik, 2022) merupakan seluruh penduduk yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Indonesia baik dalam waktu enam bulan maupun lebih dan yang berdomisili di Indonesia kurang dari enam bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap kedepannya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian (Rosa & Sovita, 2016) menunjukkan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap distribusi pendapatan. Nilai probabilitas $F < 5\%$ ($0,0000 < 5\%$) sehingga disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian (Syamsir & Rahman, 2018) menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal, aglomerasi, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk berpengaruh secara simultan terhadap disparitas distribusi pendapatan. variabel desentralisasi fiskal dan aglomerasi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian (Hindun et al., 2019) menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh secara parsial dan signifikan tetapi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kemiskinan juga berpengaruh secara parsial dan signifikan. Pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Tetapi pendidikan, pengangguran dan kemiskinan secara bersama-sama mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia tetapi hanya bisa menjelaskan 22,37% pengaruhnya, selebihnya dipengaruhi oleh faktor di luar model.

Penelitian (Afini, 2019) menunjukkan bahwa variabel PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel independen secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pemerataan Pendapatan. Semua variabel independen secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap pemerataan pendapatan di provinsi Jawa Timur, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia tidak memiliki pengaruh signifikan namun mempunyai hubungan positif terhadap pemerataan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian (Nadya & Syafri, 2019) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel pendidikan memiliki pengaruh positif dan variabel pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Didapatkan kesimpulan di Indonesia provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya adalah provinsi Banten.

Penelitian (Khoirudin & Musta'in, 2020) menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum kabupaten/kota memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Penelitian (Araja et al., 2020) menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif, variabel inflasi berpengaruh positif, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif sedangkan tingkat kemiskinan tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

METODE

Dalam menentukan metode pengumpulan data sangat penting untuk mempertimbangkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara atau dicatat oleh pihak lain. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Model regresi data panel yang digunakan untuk menganalisis penelitian yaitu:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$$

Keterangan

Y : Ketimpangan Pendapatan

X1 : Tingkat Kemiskinan

X2 : Pendidikan

X3 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X4 : Pertumbuhan Ekonomi

X5 : Jumlah Penduduk

Dalam fungsi Non Linear dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + X_3\beta_3 + X_4\beta_4 + X_5\beta_5 + \mu$$

Dimana :

Y = Ketimpangan Distribusi Pendapatan

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Parameter yang akan di estimasi

μ = Error term

HASIL DAN ANALISIS

Berdasarkan tabel 2 model estimasi data panel yang terpilih dan paling tepat digunakan yaitu *Fixed Effect Model* yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan pendidikan, IPM, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Tabel 2 Uji T Statistik

Variabel	t-hitung	t-tabel	Prob	α	Ket
Pov	3,001591	1,985802	0,0035	0,05	Signifikan
Edu	2,586675	1,985802	0,0114	0,05	Tidak Signifikan
HDI	-3,114214	1,985802	0,0025	0,05	Tidak Signifikan
Growth	0,740774	1,985802	0,4609	0,05	Tidak Signifikan
Pop	-0,530036	1,985802	0,5975	0,05	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan perhitungan pada model Fixed Effect, variabel tingkat kemiskinan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,016923 dan nilai probabilitas sebesar 0,0035 yang kurang dari nilai α 5% ($0,0035 < 0,05$). Sedangkan hasil uji parsial diketahui bahwa tingkat

kemiskinan mempunyai t hitung sebesar $3,001591 > t$ tabel $1,985802$. Berdasarkan kriteria keputusan uji t , maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Maka hipotesis penelitian yang menyatakan tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dapat diterima dan terbukti. Berdasarkan hasil dari analisis diatas dapat diketahui bahwa selama tahun 2011-2021 tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan kondisi dimana kemiskinan naik sebesar satu persen maka ketimpangan distribusi pendapatan akan meningkat sebesar $0,0035$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hindun et al., 2019) yang menyatakan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya apabila kemiskinan mengalami peningkatan, maka ketimpangan distribusi pendapatan akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari (Araja et al., (2020) yang menyatakan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. selain itu, uji F digunakan untuk mengetahui model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.

Tabel 3 Uji F (Simultan)

Cross-section fixed (dummy variables)	
F-statistic	6,984066

Sumber: Data diolah, 2022.

Nilai F hitung (F-statistic) sebesar $6,984066$ lebih besar dibandingkan dengan F tabel sebesar $2,312339$ dengan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$. Nilai F tabel sebesar $2,312339$. Berdasarkan output regresi FEM nilai Prob(F-statistic) yaitu sebesar $0,000000 < 0,05$ Berdasarkan kriteria keputusan uji F maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel kemiskinan, pendidikan, IPM, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, model regresi bisa digunakan untuk memprediksi variabel dependen dalam penelitian.

R-Squared (R^2) merupakan uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam penelitian untuk menerangkan variasi dari variabel dependennya. Nilai R^2 yang mendekati angka satu maka artinya kemampuan dari variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4 Uji R-Squared

Cross-section fixed (dummy variables)	
R-squared	0,516476

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan output pada regresi FEM pada kolom nilai R-squared diperoleh nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar $0,516476$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi/sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu variabel kemiskinan, pendidikan, IPM, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap variasi perubahan naik turunnya variabel kesenjangan distribusi pendapatan adalah sebesar $51,6476\%$ sedangkan sisanya sebesar $48,3524\%$ disebabkan oleh faktor lainnya diluar model yang tidak diteliti.

Analisis regresi data panel yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan variabel tingkat kemiskinan, pendidikan, IPM, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil pengujian menggunakan model *Fixed Effect* dapat diambil kesimpulan bahwa:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hindun et al., 2019) yang menyatakan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah kemiskinan, dimana kemiskinan ini dapat terjadi jika kebutuhan minimum masyarakat tidak terpenuhi. Jika kebutuhan minimum masyarakat terpenuhi maka menunjukkan tingkat kemiskinan yang menurun. Terpenuhinya kebutuhan minimum disebabkan karena pendapatan yang diperoleh semakin meningkat. Dampak dari meningkatnya pendapatan di masyarakat akan memperkecil celah perbedaan pendapatan yang diperoleh, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan turun.

Pendidikan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadya & Syafri, (2019) yang menyatakan variabel pendidikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Merujuk pada lampiran 1 dengan melihat data pendidikan yang rendah di kabupaten/kota di Provinsi Bali sehingga masyarakat Bali kebanyakan bekerja pada sektor informal. Pendidikan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara individu namun berdampak pada tingginya penawaran tenaga kerja berskill yang justru menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, pengaruh pendidikan di Provinsi Bali tidak signifikan.

IPM tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hindun et al., 2019) yang menyatakan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena adanya kemampuan dari sumber daya manusia masing-masing daerah Kabupaten/Kota untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda-beda, hal ini menyebabkan tidak adanya pemerataan pendapatan sehingga akan sulit untuk mengukur ketimpangan pendapatan jika hanya dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia saja. Oleh karena itu, proses pembangunan manusia yang tidak merata ini menyebabkan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan,

Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, secara simultan dan parsial variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil tidak terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Bali. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Araja et al., (2020) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Bali disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah kabupaten/kota yang mempunyai potensi sektor perekonomian yang berbeda dan beragam sehingga laju yang didapat dari pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2021.

Jumlah Penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Arif & Wicaksana, 2017) yang menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Bali tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena tingginya angka harapan hidup sehingga menunjukkan bahwa masyarakat di Bali mempunyai tingkat kesehatan yang tinggi. Dampak tingginya angka harapan hidup ini menyebabkan rendahnya angka kematian sehingga penduduk dengan usia non-produktif semakin banyak. Sehingga dapat menyebabkan tingginya rasio ketergantungan yang mana semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk dengan usia produktif terhadap usia non-produktif. Oleh

karena itu, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2021.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh dari variabel-variabel yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2021 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Ketimpangan distribusi pendapatan terbesar terjadi pada kabupaten/kota Denpasar di Provinsi Bali. Sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan terendah terjadi pada kabupaten/kota Bangli di Provinsi Bali. *Kedua*, Tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *Ketiga*, Pendidikan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *Keempat*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *Kelima*, Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *Keenam*, Jumlah penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *Ketujuh*, Secara simultan variabel tingkat kemiskinan, pendidikan, IPM, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Saran

Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dapat mengendalikan tingkat kemiskinan dengan berbagai kebijakan yang bukan hanya menguntungkan sebagian masyarakat saja tetapi secara menyeluruh, memperluas lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Bali yang memiliki daya saing rendah dengan tujuan supaya mendapatkan pekerjaan sehingga akan menghasilkan pendapatan yang menurunkan tingkat kemiskinan. Bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi masyarakat Provinsi Bali harus berpartisipasi dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga angka pengangguran berkurang yang akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afini, N. (2019). Pengaruh Pdrb Perkapita Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pemerataan Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 172–177. <https://doi.org/10.33005/jdep.v2i2.90>
- Araja, F. H., Sasana, H., & Jalunggono, G. (2020). Analysis of Income Level in Bekasi Regency. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(3), 685–699.
- Arif, M., & Wicaksana, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *University Research Colloquium*, 323–328.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks Pembangunan manusia 2020*. 283.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Penduduk*. <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab1>
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.6407>
- Margareni, N. P. A. P., Djayastra, I. K., & Yasa, I. G. . M. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali. *Piramida Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 12(1), 101–110.
- Nadya, A., & Syafri, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Media*

-
- Ekonomi*, 27(1), 37. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5300>
- Rosa, Y. Del, & Sovita, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Menara Ekonomi*, 2(4), 41–52.
- Sugiasuti, R. H., & Pratama, M. R. (2022). Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan : Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 16(1), 79–90. <https://profit.ub.ac.id/index.php/profit>
- Syamsir, A., & Rahman, A. (2018). Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.24252/ecc.v5i1.5235>
- Wijayanto, A. T. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000 Å 2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 418–428.